



modul
administrasi

modul
pembayaran

modul
persediaan

modul
penganggaran

modul
bendahara

modul
piutang

modul
komitmen

modul
Aset tetap

modul
pelaporan



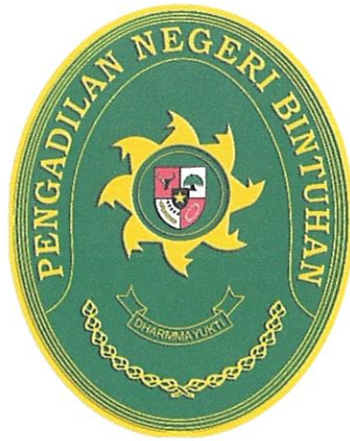
**LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 SATKER 672994
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Bintuhan - Bengkulu 38963

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

e-mail : pnbhn@pn-bintuhan.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Telp. (0739) 6180034 Fax. (0739) 6180035

Bintuhan - Bengkulu 38963

e-mail : pnbhn@pn-bintuhan.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bintuhan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bintuhan, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DINNA MUHARROKHMAL, S.H.
NIP. 19811121 201212 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65
Laporan Pendukung	70

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbn@pn-bintuhan.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bintuhan, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



DINNA MUHARROKMAH, S.H..

NIP. 19811121 201212 2 001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 4.875.486.553 atau mencapai 98,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.949.544.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.602.461.608 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.121.200; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 11.600.340.408; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 11.602.461.608.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 416.667 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.588.786.431 sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (4.588.369.764) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp. 0 dan 0 sehingga entitas mengalami surplus/(defisit)-LO sebesar Rp. (4.588.369.764)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.235.334.819 dikurangi surplus/(defisit)-LO sebesar Rp. (4.588.369.764) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.955.496.553 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 11.602.461.608.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	18,660,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	18,660,000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.441.893.000	3.421.567.497	99,41	2,441,707,245
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.050.812.000	1.017.918.646	96,87	1.142.668.719
3.	Belanja Modal	B.2.3.	456.839.000	436.000.410	95,44	0
	Jumlah Belanja Negara		4.949.544.000	4.875.486.553	98,50	3.584.375.964

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Persediaan	C. 2.	2.121.200	7,709,450
Persediaan Belum Di Register		0	0
Jumlah Aset Lancar		2.121.200	7,709,450
Aset Tetap			
Tanah	C. 3.	5.912.741.488	5,912,741,488
Peralatan dan Mesin	C. 4.	3.268.820.311	2,752,809,901
Gedung dan Bangunan	C. 5.	6.007.805.000	6.007.805.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 6.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 7.	4.787.510	4.787.510
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 8.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9.	(3.593.813.901)	(3,447,379,440)
Jumlah Aset Tetap		11.600.340.408	11,230,764,459
Aset Lainnya			
Aset Lain-Lain	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 11.	0	0
Jumlah Aset		11.602.461.608	11,238,473,909
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 12.	0	2,722,423
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 13.	0	416,668

Uang Muka dari KPPN	C. 14.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	3,139,090
Jumlah Kewajiban		0	3,139,091
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15.		
Jumlah Ekuitas Dana		11.602.461.608	11,235,334,819
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		11.602.461.608	11.238.473.909

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	301 Desember 2025	31 Desember 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	416.667	833,333
Jumlah Pendapatan		416.667	833,333
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.420.864.497	2,442,410,245
Beban Persediaan	D. 3	42.077.250	41,371,980
Beban Barang dan Jasa	D. 4	544.066.022	563,507,376
Beban Pemeliharaan	D. 5	368.561.613	381,686,002
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	66.782.588	154,640,748
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	146.434.461	293,882,533
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		4.588.786.431	3,877,498,884
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		4.588.369.764)	(3,876,665,552)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset		0	11,160,004
Pendapatan Pelepasan Aset		0	17,410,000
Beban Pelepasan Aset		0	6,249,996

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	11,160,004
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4.588.369.764)	(3,865,505,547)
Pos Luar Biasa	D. 12	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional		(4.588.369.764)	(3,865,505,547)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E. 1	11,235.334.819	11,535,124,402
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.588.369.764)	(3,865,505,547)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	4.955.496.553	3,565,715,964
Ekuitas Akhir		11.602.461.608	11,235,334,819

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
 - k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 - l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 - m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bintuhan

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Bintuhan menjadi lembaga yang dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan secara berkala mengadakan rapat dengan para Hakim, Pejabat Fungsional maupun Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan.
2. Pemahaman dan kesadaran terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing personil.
3. Adanya kerjasama dalam tim dari seluruh personil baik dalam satu bagian atau kepaniteraan maupun sesama bagian atau kepaniteraan lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset (ASET-BMN). Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul ASET adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	2.239.957.000	3.441.893.000
Belanja Barang	1.169.886.000	1.050.812.000
Belanja Modal	456.839.000	456.839.000
Jumlah Belanja	3.866.682.000	4.949.544.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp 416.667

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 416.667.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	416.667	0,00
Total Pendapatan		0	416.667	0,00

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2024 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	416.667	833.332	0	(50)
Total Pendapatan		416.667	833.332	0	(50)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara:
Rp. 4.875.486.553

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.875.486.553 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,50 persen dari anggaran senilai Rp. 4.949.544.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.441.893.000	3.421.567.497	99,43
Belanja Barang	1.050.812.000	1.017.918.646	96,87
Belanja Modal	456.839.000	436.000.410	95,44
Total Belanja Bruto	4.949.544.000	4.875.486.553	98,52
Pengembalian Belanja	0	0	
Total Belanja Netto	4.949.544.000	4.875.486.553	98,52

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 448,284,870 atau sebesar 11,98 % dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.421.567.497	2.441.707.245	979.860.252	40,13
Belanja Barang	1.017.918.646	1.142.668.719	(124.750.073)	(10,92)
Belanja Modal	436.000.410	0	436.000.410	100
Total Belanja	4.875.486.553	3.584.375.964	1.291.110.594	36,02

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp. 3.421.567.497

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 3.421.567.497 dan Rp. 2.441.707.245. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 40,13 persen

dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan jumlah pegawai di pengadilan negeri Bintuhan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.079.526.800	971.699.740	107.827.060	11,10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.273	14.725	(452)	(3,07)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59.927.580	54.825.710	5.101.870	9,31
Belanja Tunj. Anak PNS	17.807.130	19.076.128	(1.268.998)	(6,65)
Belanja Tunj. Struktural PNS	21.270.000	28.140.000	(6.870.000)	(24,41)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	123.880.000	1.051.800.000	(927.920.000)	(88,22)
Belanja Tunj. PPh PNS	13.929.400	105.213.522	(91.284.122)	(86,76)
Belanja Tunj. Beras PNS	53.083.860	50.838.840	2.245.020	4,42
Belanja Uang Makan PNS	180.579.000	147.659.000	32.920.000	22,29
Belanja Tunjangan Umum PNS	19.280.000	12.440.000	6.840.000	54,98
Belanja Tunj. PPh Pej.Negara	188.103.186	0	188.103.186	100
Belanja Tunj. Pengh.Pej.Negara	1.566.700.000	0	1.566.700.000	100
Belanja Gaji Pokok PPPK	63.044.400	0	63.044.400	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.412	0	1.412	100
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	5.299.840	0	5.299.840	100
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.919.016	0	1.919.016	100
Belanja Tunj. Beras PPPK	5.793.600	0	5.793.600	100
Belanja Uang Makan PPPK	17.808.000	0	17.808.000	100
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.340.000	0	4.340.000	100
Total Belanja Brutto	3.422.307.497	2.441.707.665	980.599.832	40,16
Pengembalian Belanja	740.000	420	739.580	176,090
Total Belanja Netto	3.421.567.497	2.441.707.245	979.860.252)	40,13

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.017.918.646 dan Rp. 1.142.668.719.
Rp. 1.017.918.646

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 11,07 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	424.935.215	473.395.507	(48.460292)	(10,24)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	0	(1.000,000)	100
Belanja Barang Persediaan	45.102.100	54,093,803	(8.991.703)	(16,62)
Belanja Jasa	120.150.230	92,099,332	28.050.898	30,46
Belanja Pemeliharaan	359.948.513	370,439,329	(10.490.816)	(2,83)
Belanja Perjalanan Dinas	66.782.588	154,640,748	(87.858.160)	(56,81)
Total Belanja Brutto	1.017.918.646	1.144.668.719	(125.750.073)	(11,07)
Pengembalian Belanja	0	2.000.000	(2,000,000)	(100)
Total Belanja Netto	1.017.918.646	1.142.668.719	(125.750.073)	(11,07)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal : Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 436.000.410 dan Rp. 0.
Rp. 436.000.410
Persentase Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	436.000.410	0	436.000.410	100
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	436.000.410	0	436.000.410	100

Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	436.000.410	0	436.000.410	100

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Aset Lancar: C.1. Aset Lancar Rp. 2.121.200

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.121.200 dan Rp. 7,709,450. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	2.121.200	7,709,450
Persediaan yang belum diregister	-	-
Total	2.121.200	7,709,450

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau

disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan :
Rp. 2.121.200*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. Rp. 7,709,450 dan Rp7,709,450 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2.121.200	7.709.450
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materal dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0
Total		2.121.200	7,709,450

Berdasarkan pemeriksaan opname fisik persediaan pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga diperoleh hasil opname fisik seluruh barang persediaan dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp. 11.600.340.408 dan Rp. 11,230,764,459 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Tanah	5,912,741,488	5,912,741,488
2	Peralatan dan Mesin	3.268.820.311	2,752,809,901
3	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	6,007,805,000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	4,787,510	4,787,510
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
	Jumlah	15.194.154.309	14,678,143,899
	Akumulasi Penyusutan	(3.593.813.901)	(3,447,379,440)
	Nilai Buku Aset Tetap	11.600.340.408	11,230,764,459

C.2.1. Tanah

Tanah : Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.912.741.488 dan Rp. 5,912,741,488.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	5.912.741.488
Mutasi Tambah	

	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2025	5.912.741.488
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	5.912.741.488

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	41.301	Jl. Pengadilan – Padang Kempas Kab. Kaur	4.745.203.000
2	1.007	Jl. Merdeka Barat Kab. Kaur	1.047.951.000
3	4.800	Jl. Syaukani Saleh - Padang Kempas	119.587.488
Jumlah			5.912.741.488

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin :
Rp. 3.268.820.311

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.268.820.311 dan Rp. 2.752.809.901

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	3.268.820.311
Mutasi Tambah	
Pembelian Peralatan dan Mesin	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	

Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	3.268.820.311
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2.521.490.400)
Nilai Buku 31 Desember 2025	747.329.911

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp 6.007.805.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.007.805.000 dan Rp. 6.007.805.000 .

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	6.007.805.000
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Saldo per 31 Desember 2025	6.007.805.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.072.323.501)
Nilai Buku 31 Desember 2025	4.935.481.499

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	0
----------------------------	---

Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp. 4.787.510*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.787.510 dan Rp 4.787.510.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	4.787.510
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 30 September 2025	4.787.510
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	4.787.510

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan :
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. (3.593.813.901)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. (3.593.813.901) dan Rp. (3,447,379,440).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.268.820.311	(2.521.490.400)	747.329.911
2	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	(1.072.323.501)	4.935.481.499
3	Aset lain - lain	0	0	0
		9.276.625.311	(3.593.813.901)	5.682.811.410

C.3. Aset Tetap Lainnya

*Aset
Lainnya:
Rp.4,787,510*

Nilai perolehan aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,787,510 dan Rp. 4,787,510.

C.3.1. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 148,801,641. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak

Aset Lain-

lain: berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri
Rp. 0 Bintuhan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya:
Rp. 0*

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Aset Tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai Perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai Buku Aset Lainnya	0	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 3,139,090 , Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera

diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2025 tercatat sebesar Rp. 0. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	0	2,722,423
Pendapatan Diterima Dimuka	0	416,667
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	3,139,090

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp 0 dan Rp 2,722,423 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan belanja yang masih harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang
Muka dari
KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas : Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.602.461.608 dan Rp. 11,235,334,819 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP: Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 833,332 dan Rp. 336,500. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (turun)	
			Rp	%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	416.667	833,332		
Total Pendapatan	416.667	833,332	(416.666)	50

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.420.864.497 dan Rp. 2,442,410,245 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (turun)	
			Rp.	%
Beban Tunj. Beras PNS	53.083.860	50,838,840	2.245.020	4,42
Beban Tunj. PPh PNS	13.929.400	105,213,522	(91.284.122)	(86,76)
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.880.000	1,051,800,000	(927.920.000)	(88,22)
Beban Tunjangan Umum PNS	19.280.000	12,440,000	(6.840.000)	(54,98)
Beban Uang Makan PNS	179.876.000	148,362,000	31.514.000	21,24
Beban Tunj. Struktural PNS	21.270.000	28,140,000	6.870.000	24,41
Beban Gaji Pokok PNS	1.079.526.800	971,699,740	107.827.060	11,10
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59.927.580	54,825,710	5.101.870	9,31
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.273	14.725	(452)	(3,07)
Beban Tunj. Anak PNS	17.807.130	19,076,128	(1.268.998)	(6,65)
Beban Tunj. PPh Pej.Negara	188.103.186	0		100
Beban Tunj. Pengh.Pej.Negara	1.556.700.000	0		100
Beban Gaji Pokok PPPK	63.044.400	0		100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.412	0		100
Beban Tun.Suami/Istri PPPK	5.299.840	0		100
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.919.016	0		100
Beban Tunjangan Beras PPPK	5.793.600	0		100
Beban Tunj. Umum PPPK	4.340.000	0		100
Beban Tunj. Uang Makan P3K	17.808.000	0		100
Total Beban Pegawai	3.420.864.497	2,442,410,245	978.454.252	(40,061)

D.3. Beban Persediaan

**Beban
Persediaan :**
Rp. 42.077.250

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.077.250 dan Rp. 41,371,980 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun)	
				Rp	%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	42.077.250	41.371.980	705.270	1,705
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total		42.077.250	41.371.980	705.270	1.705

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang
dan Jasa :
Rp. 544.146.881*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 544.146.881 dan Rp. 567.507.376. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.317.600	4.281,168	(22,51)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	(2,000,000)	(100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49.071.270	39,528,000	24,14
Beban Jasa Lainnya	500.000	750,000	(33,33)
Beban Barang Operasional Lainnya	5.067.890	17,294,590	(70,70)
Beban Sewa	119.131.398	90,868,000	31,10
Beban Langganan Telepon	477.096	483,882	(1,40)
Beban Keperluan Perkantoran	375.581.627	412,301,736	(8,91)

Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	0	100
Beban Bahan	300.000	0	100
Total Beban Jasa	554.146.881	567,507,376	(2,35)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.
368.561.613

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 368.561.613 dan Rp 381,686,002 . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun)	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,850,949	234,866,810	33,205,979	(12,38)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,097,564	135,572,519	6,762,476	4,98
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,613,100	11,246,673	11,246,673	100
Total Beban Pemeliharaan	368,561,613	381,686,002	(1.3124.389)	(3,44)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas:
Rp. 66.782.588

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.782.588 dan

Rp. 154,640,748 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Perjalanan Biasa	66.782.588	154,640,748	(56,814)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	66.782.588	154,640,748	(56,814)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat:
Rp. 0*

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban
Bantuan
Sosial: Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi:
Rp. 331.349.493

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 331.349.493 dan Rp. 293.882.533 . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	193,423,178	155,956,218	24,02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,926,315	137,926,315	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan	331,349,493	293.882.533	12,75
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Beban Amortisasi	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	331.349.493	293.882.533	12,75

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih:
Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional: Rp. 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas

Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Total Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos
Luar Biasa:
Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (turun) %
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp. 11.235.334.819*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp. 11.235.334.819 dan Rp. 11,535,124,402.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus (defisit) LO:
Rp. (4.588.369.764) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (4.588.369.764) dan Rp. (3,865,505,547). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Menambah dan Mengurangi

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset:
Rp. 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan:
Rp. 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap:
Rp. 0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi:
Rp. 0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain:
Rp. 0*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Koreksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas:
Rp. 4.955.496.553

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.955.496.553 dan Rp. 3,565,715,964. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.875.486.553
Transfer Masuk	80.010.000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	4.955.496.553

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.875.486.553.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar

Rp.80.010.000. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pengesahan Hibah (dalam satuan Rupiah)		
Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Nihil		0
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Rp. 11.407.465.717 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.407.465.717 dan Rp. 11,235,334,819.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu dijelaskan dalam laporan Semester II TA 2025 ini.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bintuhan adalah :

1. BRI Virtual Account 653246729941000 a.n. BPG 121 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.
Nomor Surat Izin: S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.
2. BRI Virtual Account 654446729951000 a.n. BPg 121 PN Bintuhan yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.
Nomor Surat Izin: S-153/WPB.12/KP.06/2021 Tanggal 21 Januari 2021.
3. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000089.30.4 a.n. RPL 121 PN BINTUHAN yang digunakan sebagai penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.89.597.040.
Nomor Surat Izin: S-4880/MK.5/2015 Tanggal 10 September 2015.

F.2.3. Revisi DIPA

Telah dilaksanakan 16 kali revisi DIPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun rincian Revisi DIPA sebagai berikut:

1. Revisi Ke-1 (Kanwil) tertanggal 8 Januari 2025 tentang Revisi POK dan Hal III DIPA.
2. Revisi Ke-2 (DJA) tertanggal 14 Februari 2025 tentang Revisi Penyesuaian Anggaran Mahkamah Agung RI.
3. Revisi Ke-3 (Kanwil) tertanggal 28 Februari 2025 tentang Revisi hal III DIPA.
4. Revisi Ke-4 (DJA) tertanggal 14 Maret 2025 tentang Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI.
5. Revisi ke-5 (Kanwil) tertanggal 17 April 2025 tentang Revisi POK dan Hal III DIPA
6. Revisi ke-6 (PA) tertanggal 23 Mei 2025 Revisi Anggaran TA 2025.
7. Revisi ke-7 (DJA) tertanggal 30 Juni 2025 Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI.
8. Revisi ke-8 (Kanwil) tertanggal 8 Juli 2025 Revisi Hal III DIPA.
9. Revisi ke-9 (PA) tertanggal 16 Juli 2025 Revisi Anggaran.
10. Revisi ke-10 (Kanwil) tertanggal 30 Juli 2025 Revisi ke 10.
11. Revisi ke-11 (Kanwil) tertanggal 3 September 2025 Revisi POK dan Hal III DIPA.
12. Revisi ke-12 (Kanwil) tertanggal 25 September 2025 Revisi Anggaran.
13. Revisi ke-13 (DJA) tertanggal 16 Oktober 2025 Revisi Buka Blokir.
14. Revisi ke-14 (DJA) tertanggal 30 Oktober 2025 Revisi Anggaran.
15. Revisi ke-15 (PA) tertanggal 5 November 2025 Revisi Anggaran.
16. Revisi ke-16 (KPA) tertanggal 2 Desember 2025 Revisi Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Belum terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB sampai dengan 31 Desember 2024.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang perlu dipaparkan dalam laporan keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 8:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,121,200	7,709,450	(5,588,250)	(72.49)
JUMLAH ASET LANCAR	2,121,200	7,709,450	(5,588,250)	(72.49)
ASET TETAP				
Tanah	5,912,741,488	5,912,741,488	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,268,820,311	2,752,809,901	516,010,410	18.74
Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	6,007,805,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,787,510	4,787,510	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,778,728,933)	(3,447,379,440)	(331,349,493)	9.61
JUMLAH ASET TETAP	11,415,425,376	11,230,764,459	184,660,917	1.64
JUMLAH ASET	11,417,546,576	11,238,473,909	179,072,667	1.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,212,982,499	2,722,423	1,210,260,076	44,455.25
Pendapatan Diterima Dimuka	0	416,667	(416,667)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,212,982,499	3,139,090	1,209,843,409	38,541.21
JUMLAH KEWAJIBAN	1,212,982,499	3,139,090	1,209,843,409	38,541.21
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH EKUITAS	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH EKUITAS	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,417,546,576	11,238,473,909	179,072,667	1.59

Keterangan :
FINAL

BINTUHAN, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DINNA MUHARROKHMAH
198111212012122001 198111212012122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,235,334,819	11,535,124,402	(299,789,583)	(2.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,986,267,295)	(3,865,505,547)	(2,120,761,748)	54.86
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,955,496,553	3,565,715,964	1,389,780,589	38.98
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,030,770,742)	(299,789,583)	(730,981,159)	243.83
EKUITAS AKHIR	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)

Keterangan :

FINAL

BINTUHAN, 25 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 DINNA MUHARROKMAH
 198111212012122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 672994

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:37 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	1,576,000	18,660,000	17,084,000	1,184.01
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	1,576,000	18,660,000	17,084,000	1,184.01
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	1,576,000	18,660,000	17,084,000	1,184.01
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,949,544,000	4,875,486,553	(74,057,447)	98.50	3,630,167,000	3,584,375,964	(45,791,036)	98.74
1. Belanja Pegawai	3,441,893,000	3,421,567,497	(20,325,503)	99.41	2,466,440,000	2,441,707,245	(24,732,755)	99
2. Belanja Barang	1,050,812,000	1,017,918,646	(32,893,354)	96.87	1,163,727,000	1,142,668,719	(21,058,281)	98.19
3. Belanja Modal	456,839,000	436,000,410	(20,838,590)	95.44	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 672994

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 9:37 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,949,544,000	4,875,486,553	(74,057,447)	98.50	3,630,167,000	3,584,375,964	(45,791,036)	98.74
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BINTUHAN, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DINNA MUHARROKHAMAH
198111212012122001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:38 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	416,667	833,333	(416,666)	(50)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	416,667	833,333	(416,666)	(50)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	416,667	833,333	(416,666)	(50)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,623,766,137	2,442,410,245	2,181,355,892	89.312
Beban Persediaan	42,077,250	41,371,980	705,270	1.705
Beban Barang dan Jasa	554,146,881	563,507,376	(9,360,495)	(1.661)
Beban Pemeliharaan	368,561,613	381,686,002	(13,124,389)	(3.439)
Beban Perjalanan Dinas	66,782,588	154,640,748	(87,858,160)	(56.814)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:38 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	331,349,493	293,882,533	37,466,960	12.749
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,986,683,962	3,877,498,884	2,109,185,078	54.396
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,986,267,295)	(3,876,665,551)	(2,109,601,744)	54.418
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	11,160,004	(11,160,004)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	17,410,000	(17,410,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	6,249,996	(6,249,996)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	11,160,004	(11,160,004)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,986,267,295)	(3,865,505,547)	(2,120,761,748)	54.864
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,986,267,295)	(3,865,505,547)	(2,120,761,748)	54.864

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,875,486,553
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,079,526,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,273	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59,927,580	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,807,130	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,270,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	123,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13,929,400	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53,083,860	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	180,579,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,280,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	188,103,186	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,566,700,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	63,044,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,412	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,299,840	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,919,016	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,793,600	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	17,808,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,340,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	367,478,455	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,317,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,071,270	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,067,890	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,102,100	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	518,832	0
3.0	522141	Belanja Sewa	119,131,398	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,850,949	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,097,564	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,782,588	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	436,000,410	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
JUMLAH			4,876,226,553	4,876,226,553

Keterangan :
FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,742,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	378,600	0
0.0	131111	Tanah	5,912,741,488	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,268,820,311	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,787,510	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,637,442,274
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,141,286,659
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,202,901,640
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,080,859
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,875,486,553
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,010,000
0.0	391111	Ekuitas	0	11,235,334,819
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	416,667
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,079,526,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,273	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59,927,580	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,807,130	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,270,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	123,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,929,400	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	53,083,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	179,876,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	18,540,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	452,904,826	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,504,800,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	63,044,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,412	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,299,840	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,919,016	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,793,600	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,808,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,340,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	367,512,754	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,317,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,071,270	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,067,890	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	8,068,873	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	477,096	0
3.0	522141	Beban Sewa	119,131,398	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,850,949	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,097,564	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	66,782,588	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	193,423,178	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,926,315	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,077,250	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,613,100	0
JUMLAH			21,182,959,471	21,182,959,471

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2600 **BENGKULU**
SATUAN KERJA : 672994 **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/02/26 9:44 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 25/2/26 8:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	970,682,000	1,080,339,000	1,079,526,800	0	1,079,526,800	99.92	812,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	17,000	14,273	0	14,273	83.96	2,727
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,959,000	61,004,000	59,927,580	0	59,927,580	98.24	1,076,420
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,158,000	18,069,000	17,807,130	0	17,807,130	98.55	261,870
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	21,740,000	21,270,000	0	21,270,000	97.84	470,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	901,539,000	125,380,000	123,880,000	0	123,880,000	98.8	1,500,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	94,633,000	13,931,000	13,929,400	0	13,929,400	99.99	1,600
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,523,000	53,160,000	53,083,860	0	53,083,860	99.86	76,140
511129	Belanja Uang Makan PNS	125,000,000	182,350,000	180,579,000	0	180,579,000	99.03	1,771,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,310,000	19,310,000	19,280,000	740,000	18,540,000	96.01	770,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,239,957,000	1,575,300,000	1,569,298,043	740,000	1,568,558,043	99.57	6,741,957
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	200,687,000	188,103,186	0	188,103,186	93.73	12,583,814
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	1,566,700,000	1,566,700,000	0	1,566,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	1,767,387,000	1,754,803,186	0	1,754,803,186	99.29	12,583,814
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	63,450,000	63,044,400	0	63,044,400	99.36	405,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,000	1,412	0	1,412	70.6	588
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	5,300,000	5,299,840	0	5,299,840	100	160
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,920,000	1,919,016	0	1,919,016	99.95	984
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,794,000	5,793,600	0	5,793,600	99.99	400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	18,400,000	17,808,000	0	17,808,000	96.78	592,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	99,206,000	98,206,268	0	98,206,268	98.99	999,732
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,239,957,000	3,441,893,000	3,422,307,497	740,000	3,421,567,497	99.41	20,325,503
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	418,139,000	375,590,000	367,478,455	0	367,478,455	97.84	8,111,545
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,000,000	5,000,000	3,317,600	0	3,317,600	66.35	1,682,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	52,800,000	49,620,000	49,071,270	0	49,071,270	98.89	548,730
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,200,000	5,200,000	5,067,890	0	5,067,890	97.46	132,110
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	482,139,000	435,410,000	424,935,215	0	424,935,215	97.59	10,474,785

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 2600 **BENGKULU**
SATUAN KERJA : 672994 **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/02/26 9:44 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 25/2/26 8:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,054,000	45,107,000	45,102,100	0	45,102,100	99.99	4,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,054,000	45,107,000	45,102,100	0	45,102,100	99.99	4,900
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langgananan Telepon	6,000,000	6,000,000	518,832	0	518,832	8.65	5,481,168
522141	Belanja Sewa	100,280,000	122,320,000	119,131,398	0	119,131,398	97.39	3,188,602
522191	Belanja Jasa Lainnya	500,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	106,780,000	128,820,000	120,150,230	0	120,150,230	93.27	8,669,770
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250,640,000	226,892,000	226,850,949	0	226,850,949	99.98	41,051
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141,653,000	146,773,000	133,097,564	0	133,097,564	90.68	13,675,436
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	392,293,000	373,665,000	359,948,513	0	359,948,513	96.33	13,716,487
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133,620,000	66,810,000	66,782,588	0	66,782,588	99.96	27,412
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	133,620,000	66,810,000	66,782,588	0	66,782,588	99.96	27,412
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,169,886,000	1,050,812,000	1,017,918,646	0	1,017,918,646	96.87	32,893,354
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456,839,000	456,839,000	436,000,410	0	436,000,410	95.44	20,838,590
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	456,839,000	456,839,000	436,000,410	0	436,000,410	95.44	20,838,590
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	456,839,000	456,839,000	436,000,410	0	436,000,410	95.44	20,838,590
	JUMLAH BELANJA	3,866,682,000	4,949,544,000	4,876,226,553	740,000	4,875,486,553	98.5	74,057,447

Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025
(Unaudited)





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Bintuhan, 20 Februari 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Kuasa Pengguna Barang



DINNA MUHARROKHAH



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
- 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025**
- 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)**
- 4. Laporan Barang Persediaan**
- 5. Laporan Barang Intrakomptabel**
- 6. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- 7. Laporan Barang Gabungan**
- 8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 9. Laporan Aset Tak Berwujud**
- 10. Laporan Barang Bersejarah**
- 11. Laporan Barang Rusak Berat**
- 12. Laporan Barang Hilang**
- 13. Laporan Barang BPYBDS**
- 14. Laporan Barang Hibah DK/TP**
- 15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel**
- 16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel**
- 17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud**
- 18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)**
- 19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)**
- 20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara**
- 21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara**
- 22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara**

DATA TAMBAHAN

- 1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)**
- 2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya**
- 3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)**
- 4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan**
- 5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Bintuhan selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Bintuhan selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bintuhan beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung



dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp15.212.784.159,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp14.696.073.749,00 dan mutasi tambah sebesar Rp516.710.410,00;
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian (2) Transfer Masuk BMN dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp516.710.410,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: nihil dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp0,00;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari



upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Bintuhan telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan - Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbn@pn-bintuhan.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

**Pada Pengadilan Negeri Bintuhan
Periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1071/SEK.W8-U5/PL1.2.7/XII/2025**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bintuhan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama : Tajudin Roni
NIP : 199606042025211025
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Nurul Fializah, S.Ak.
NIP : 199812172022032009
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Bintuhan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Pengadilan Negeri Bintuhan yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	11.238.473.909,00	190.249.167,00	11.417.546.576,00
A	ASET LANCAR	7.709.450,00	5.588.250,00	2.121.200,00
1	Persediaan	7.709.450,00	5.588.250,00	2.121.200,00
B	ASET TETAP	11.230.764.459,00	184.660.917,00	11.415.425.376,00
1	Tanah	5.912.741.488,00	-	5.912.741.488,00
2	Peralatan dan Mesin	2.752.809.901,00	516.010.410,00	3.268.820.311,00
3	Gedung dan Bangunan	6.007.805.000,00	-	6.007.805.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	4.787.510,00	-	4.787.510,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.447.379.440,00)	(331.349.493,00)	(3.778.728.933,00)
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	7.649.075,00	(1.792.730,00)	5.856.345,00
1	Ekstrakomptabel	17.929.850,00	700.000,00	18.629.850,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(10.280.775,00)	(2.492.730,00)	(12.773.505,00)
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	11.246.122.984,00	188.456.437,00	11.423.402.921,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan



Tajudin Roni
NIP. 199606042025211025

Operator GLP



Nurul Fializah, S.Ak.
NIP. 199812172022032009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan



Dinna Muharrokhmah, S.H.
NIP. 198111242012122001



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl.Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl.Cetak : 20/02/26 9:08 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,742,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	378,600
131111	Tanah	5,912,741,488
132111	Peralatan dan Mesin	3,268,820,311
133111	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000
135121	Aset Tetap Lainnya	4,787,510
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,637,442,274)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,141,286,659)
J U M L A H		11,417,546,576

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
198111212012122001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tanggal : 20/02/26 9:10 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,753,950
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,955,500
131111	Tanah	5,912,741,488
132111	Peralatan dan Mesin	2,752,809,901
133111	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000
135121	Aset Tetap Lainnya	4,787,510
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,444,019,096)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,003,360,344)
J U M L A H		11,238,473,909

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 672994 **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tanggal : 20/02/26 9:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	21,700
1010301003	Penjepit Kertas	56,500
1010301004	Penghapus/Korektor	6,900
1010301005	Buku Tulis	488,000
1010301006	Ordner Dan Map	192,300
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	85,800
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	20,400
1010302001	Kertas HVS	186,300
1010302002	Berbagai Kertas	250,000
1010302004	Amplop	67,800
1010304004	Tinta/Toner Printer	332,900
1010306010	Batu Baterai	34,000
Jumlah Barang Konsumsi		1,742,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	307,400
1010305012	Pengharum Ruangan	71,200
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		378,600
TOTAL		2,121,200

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 9:12 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		47,108	5,912,741,488	42,308	5,793,154,000	42,308	5,793,154,000	47,108	5,912,741,488
20101	TANAH PERSIL	-	47,108	5,912,741,488	42,308	5,793,154,000	42,308	5,793,154,000	47,108	5,912,741,488
132111	Peralatan dan Mesin		484	2,752,809,901	16	516,010,410	0	0	500	3,268,820,311
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	5	235,354,851	1	367,000,410	0	0	6	602,355,261
30501	ALAT KANTOR	-	92	321,867,632	0	0	0	0	92	321,867,632
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	303	970,540,806	8	69,000,000	0	0	311	1,039,540,806
30601	ALAT STUDIO	-	10	67,586,468	0	0	0	0	10	67,586,468
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	5,850,000	0	0	0	0	1	5,850,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	199,970,000	0	0	0	0	1	199,970,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	50	684,659,678	7	80,010,000	0	0	57	764,669,678
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	22	266,980,466	0	0	0	0	22	266,980,466
133111	Gedung dan Bangunan		6	6,007,805,000	1	4,694,186,000	1	4,694,186,000	6	6,007,805,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,173,732,000	1	4,694,186,000	1	4,694,186,000	5	5,173,732,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	834,073,000	0	0	0	0	1	834,073,000
135121	Aset Tetap Lainnya		7	4,787,510	0	0	0	0	7	4,787,510
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	7	4,787,510	0	0	0	0	7	4,787,510
TOTAL				14,678,143,899		11,003,350,410		10,487,340,000		15,194,154,309

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKMAH, S.H.
198111212012122001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 9:13 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		42	17,929,850	1	700,000	0	43	18,629,850
30501	ALAT KANTOR	-	24	5,623,200	0	0	0	24	5,623,200
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	17	12,026,150	0	0	0	17	12,026,150
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	280,500	1	700,000	0	2	980,500
TOTAL				17,929,850		700,000	0		18,629,850


 Bintuhan, 20 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
 198111212012122001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 9:16 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		47,108	5,912,741,488	42,308	5,793,154,000	42,308	5,793,154,000	47,108	5,912,741,488
20101	TANAH PERSIL	-	47,108	5,912,741,488	42,308	5,793,154,000	42,308	5,793,154,000	47,108	5,912,741,488
132111	Peralatan dan Mesin		526	2,770,739,751	17	516,710,410	0	0	543	3,287,450,161
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	5	235,354,851	1	367,000,410	0	0	6	602,355,261
30501	ALAT KANTOR	-	116	327,490,832	0	0	0	0	116	327,490,832
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	320	982,566,956	8	69,000,000	0	0	328	1,051,566,956
30601	ALAT STUDIO	-	10	67,586,468	0	0	0	0	10	67,586,468
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	5,850,000	0	0	0	0	1	5,850,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	199,970,000	0	0	0	0	1	199,970,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	50	684,659,678	7	80,010,000	0	0	57	764,669,678
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	23	267,260,966	1	700,000	0	0	24	267,960,966
133111	Gedung dan Bangunan		6	6,007,805,000	1	4,694,186,000	1	4,694,186,000	6	6,007,805,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,173,732,000	1	4,694,186,000	1	4,694,186,000	5	5,173,732,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	834,073,000	0	0	0	0	1	834,073,000
135121	Aset Tetap Lainnya		7	4,787,510	0	0	0	0	7	4,787,510
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	7	4,787,510	0	0	0	0	7	4,787,510
TOTAL				14,696,073,749		11,004,050,410		10,487,340,000		15,212,784,159

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKMAH, S.H.
198111212012122001

Kode UAKPB

005012600672994000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan

SATKER

Jenis Laporan

Laporan Utama

Laporan

Laporan Barang

Sub Laporan

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Rincian Barang

KELOMPOK

Periode Sampai Dengan

2025-13

Tipe File

☒ PDF

☐ Excel

Warning

i Laporan tidak ditemukan.

✓ OK

↶ Unduh

➦ Keluar

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tanggal : 20/02/26 9:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKMAH, S.H.
198111212012122001

Kode UAKPB

005012600672994000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan

SATKER

Jenis Laporan

Laporan Utama

Laporan

Laporan Barang

Sub Laporan

BARANG BERSEJARA

Rincian Barang

KELOMPOK

Periode Sampai Dengan

2025-13

Tipe File

☒ PDF ☐ Excel

Warning

 Laporan tidak ditemukan.

✓ OK

⇌ Unduh

➤ Keluar

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KODE UAKPB : 672994

TANGGAL : 20-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

BINTUHAN, 20 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
NIP. 198111212012122001

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KODE UAKPB : 672994

TANGGAL : 20-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											


BINTUHAN, 20 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKMAH, S.H.
NIP. 1981112012122001

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KODE UAKPB : 672994

TANGGAL : 20-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

BINTUHAN, 20 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
NIP. 198111212012122001

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KODE UAKPB : 672994

TANGGAL : 20-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

BINTUHAN, 20 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
NIP. 198111212012122001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 672994 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KuantITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		47,108	5,912,741,488	0	0	0	5,912,741,488
20101	TANAH PERSIL	-	47,108	5,912,741,488	0	0	0	5,912,741,488
132111	Peralatan dan Mesin		500	3,268,820,311	(2,444,019,096)	(193,423,178)	(2,637,442,274)	631,378,037
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	6	602,355,261	(235,354,851)	(26,214,315)	(261,569,166)	340,786,095
30501	ALAT KANTOR	-	92	321,867,632	(293,898,632)	(8,123,000)	(302,021,632)	19,846,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	311	1,039,540,806	(872,084,996)	(37,538,324)	(909,623,320)	129,917,486
30601	ALAT STUDIO	-	10	67,586,468	(40,745,558)	(10,736,364)	(51,481,922)	16,104,546
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	5,850,000	(5,850,000)	0	(5,850,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	199,970,000	(159,960,000)	(20,005,000)	(179,965,000)	20,005,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	57	764,669,678	(576,588,343)	(85,843,675)	(662,432,018)	102,237,660
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	22	266,980,466	(259,536,716)	(4,962,500)	(264,499,216)	2,481,250
133111	Gedung dan Bangunan		6	6,007,805,000	(1,003,360,344)	(137,926,315)	(1,141,286,659)	4,866,518,341
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	5,173,732,000	(875,041,426)	(119,595,041)	(994,636,467)	4,179,095,533
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	834,073,000	(128,318,918)	(18,331,274)	(146,650,192)	687,422,808
135121	Aset Tetap Lainnya		7	4,787,510	0	0	0	4,787,510
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	7	4,787,510	0	0	0	4,787,510
JUMLAH			47,621	15,194,154,309	(3,447,379,440)	(331,349,493)	(3,778,728,933)	11,415,425,376

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKHAH, S.H.
198111212012122001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 672994 **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/02/26 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		43	18,629,850	(10,280,775)	(2,492,730)	(12,773,505)	5,856,345
30501	ALAT KANTOR	-	24	5,623,200	(5,623,200)	0	(5,623,200)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	17	12,026,150	(4,377,075)	(2,405,230)	(6,782,305)	5,243,845
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	2	980,500	(280,500)	(87,500)	(368,000)	612,500
JUMLAH			43	18,629,850	(10,280,775)	(2,492,730)	(12,773,505)	5,856,345

Bintuhan, 20 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

DINNA MUHARROKMAH, S.H.
198111212012122001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 672994 **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM
Tanggal : 20/02/26 9:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8


 Bintuhan, 20 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 DINNA MUHARROKHMAH, S.H.
 198111212012122001



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bintuhan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Bintuhan selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Bintuhan. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas



minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Bintuhan dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan



penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025** perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026** tentang **Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited)**.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bintuhan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp15.212.784.159,00 (*lima belas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp14.696.073.749,00 (*empat belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp516.710.410,00 (*lima ratus enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp516.710.410,00 (*lima ratus enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah*). dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;



5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebesar Rp14.696.073.749,00 (*empat belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp14.678.143.899,00 (*empat belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp17.929.850,00 (*tujuh belas juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.709.450,00



(tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	5.753.950,00	4.011.350,00	1.742.600,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.955.500,00	1.576.900,00	378.600,00
Jumlah		7.709.450,00	5.588.250,00	2.121.200,00

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.912.741.488,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 47.108 m² dengan nilai sebesar Rp5.912.741.488,00 (*lima milyar Sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp5.793.154.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh empat rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp5.793.154.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh empat rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	5.912.741.488,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
------------------------	---------------------



Reklasifikasi Keluar	5.912.741.488,00
----------------------	------------------

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*)

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	47.108 m ²	5.912.741.488,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*)

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 543 buah dengan nilai sebesar Rp 3.287.450.161,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 526 buah dengan nilai sebesar Rp2.770.739.751,00 (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp516,710,410,00 (*lima ratus enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).



Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

- a. Alat Besar (3.01)
- b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp602.355.261,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp235.354.851,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp367.000.410,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	367.000.410,00	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	5	428.804.110,00
Rusak Ringan	1	. 173,551,151,00
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Angkutan



- c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)
- d. Alat Pertanian (3.04)
- e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 436 buah dengan nilai sebesar Rp1.378.587.788,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 428 buah dengan nilai sebesar Rp 1.309.587.788,00, mutasi tambah sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp69.000.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	69.000.000,00	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	436	1.378.587.788,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga



f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp273.406.468,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp273.406.468,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	12	273.406.468,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar



- g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)
- h. Alat Laboratorium (3.08)
- i. Alat Persenjataan (3.09)
- j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 81 buah dengan nilai sebesar Rp1.032.630.644,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 73 buah dengan nilai sebesar Rp 951.920.644, mutasi tambah sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp 80.710.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	700.000,00
Transfer Masuk Online	80.010.000,00	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Komputer

Dari jumlah Komputer di atas, Saldo Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	81	1.032.630.644,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Komputer

- k. Alat Eksplorasi (3.11)
- l. Alat Pengeboran (3.12)
- m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)
- n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
- o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)
- p. Alat Peraga (3.16)
- q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)
- r. Rambu-Rambu (3.18)
- s. Peralatan Olahraga (3.19)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bintuhan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.650.215.779,00 (*dua milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp(2.637.442.274,00) dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp(12.773.505,00).

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp436.700.410,00.



4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp6.007.805.000,00 (*enam milyar tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp6.007.805.000,00 (*enam milyar tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp6.007.805.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp6.007.805.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...
...	...	...

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional



pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	6	6.007.805.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Bangunan Gedung

- b. Monumen (402)
- c. Bangunan Menara (403)
- d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bintuhan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.141.286.659,00) (*satu milyar serratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp(1.141.286.659,00) dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang



sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bintuhan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp4.787.510,00 (*empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp4.787.510,00 (*empat juta*



tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp4.787.510,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp4.787.510,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 22. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 23. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

- b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)
- c. Tanaman (6.05)
- d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bintuhan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 25. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan



nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

- 1) Software
- 2) Lisensi
- 3) Hak Kajian/Penelitian
- 4) Aset Tak Berwujud Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).



Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	-	-
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 28. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang



sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau (Nama Satker) tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.214.905.359,00 (*lima belas milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.121.200		-		2.121.200	
	Sub Jumlah (1)	2.121.200		-		2.121.200	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	5.912.741.488		-		5.912.741.488	
2	Peralatan dan Mesin	3.268.820.311		18.629.850		3.287.450.161	
3	Gedung dan Bangunan	6.007.805.000		-		6.007.805.000	
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-		-		-	
5	Aset Tetap Lainnya	4.787.510		-		4.787.510	
6	KDP	-		-		-	
	Sub Jumlah (2)	15.194.154.309		18.629.850		15.212.784.159	
III	Aset Lainnya						



1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-
Sub Jumlah (3)		-	-	-
Total		15.196.275.509	18.629.850	15.214.905.359

Tabel 31. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-		-		-	
Sub Jumlah (1)		-		-		-	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-		-		-	
2	Peralatan dan Mesin	(2.637.442.274)		(12.773.505)		(2.650.215.779)	
3	Gedung dan Bangunan	(1.141.286.659)		-		(1.141.286.659)	
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-		-		-	
5	Aset Tetap Lainnya	-		-		-	
6	KDP	-		-		-	
Sub Jumlah (2)		(3.778.728.933)		(12.773.505)		(3.791.502.438)	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		-		-	
2	Aset Tak Berwujud	-		-		-	
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-		-		-	
Sub Jumlah (3)		-		-		-	
Total		(3.778.728.933)		(12.773.505)		(3.791.502.438)	

Tabel 32. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca



B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	2.121.200	2.121.200	0
1	Persediaan	2.121.200	2.121.200	0
II	Aset Tetap	11.417.546.576	11.417.546.576	0
1	Tanah	5.912.741.488	5.912.741.488	0
2	Peralatan dan Mesin	3.268.820.311	3.268.820.311	0
3	Gedung dan Bangunan	6.007.805.000	6.007.805.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	4.787.510	4.787.510	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.778.728.933)	(3.778.728.933)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		11.417.546.576	11.417.546.576	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 33. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:



No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	14.151.093.604	373.187.927	3,91%
2	Laporan Unaudited 2022	14.547.342.902	369.250.898	3,93%
3	Laporan Unaudited 2023	14.844.875.390	297.532.488	2,004%
4	Laporan Unaudited 2024	14.696.073.749	148.801.641	1,012%
5	Laporan Unaudited 2024	15.212.784.159	516.710.410	3,39%

Tabel 34. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Bintuhan per Periode Laporan Unaudited

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	42.308	5.912.741.488
2	Alat Angkutan Bermotor	1	367.000.410	5	235.354.851
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	8	69.000.000	448	1.582.994.256
4	Peralatan dan Mesin TIK	1	700.000	80	1.031.930.644
5	Alat Berat	0	0	0	0
6	Bangunan Gedung	0	0	6	6.007.805.000
7	Rumah Negara	0	0	0	0
8	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0
11	Aset Tetap lainnya	0	0	7	4.787.510
12	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
JUMLAH		10	436.700.410	42854	14.775.613.749

Tabel 35. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bintuhan selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 36. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 37. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	2

Tabel 38. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bintuhan



i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, Tidak Terdapat temuan BPK pada Pengadilan Negeri Bintuhan terkait Aset Tetap dan Persediaan dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	NIHIL	NIHIL

Tabel 39. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	NIHIL	NIHIL

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Negeri Bintuhan



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bintuhan telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Sepeda Motor	Tidak Disetujui
2	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
3	Pemeliharaan	CCTV - Camera Control Television System	Disetujui
4	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
5	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat	Disetujui



		Pendingin)	
6	Pemeliharaan	Genset	Disetujui
7	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Disetujui
8	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
9	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
10	Pemeliharaan	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Disetujui
11	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
12	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
13	Pemeliharaan	Server	Disetujui
14	Pemeliharaan	Router	Disetujui
15	Pemeliharaan	Hub	Disetujui
16	Pemeliharaan	Rak Server	Tidak Disetujui
17	Pemeliharaan	Kabel UTP	Tidak Disetujui
18	Pemeliharaan	Wireless Access Point	Disetujui
19	Pemeliharaan	Switch	Disetujui
20	Pemeliharaan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Disetujui
21	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	Disetujui
22	Pemeliharaan	Gedung Pos Jaga Permanen	Disetujui
23	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	Disetujui
24	Pemeliharaan	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Disetujui
25	Pemeliharaan	Pagar Permanen	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 110 usulan dan tidak disetujui sebanyak 5 usulan.

Pengadilan Negeri Bintuhan tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027.

Pengadilan Negeri Bintuhan mengajukan Revisi RKBMN untuk Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Station Wagon	1	Disetujui
2	Pengadaan Rumah Negara Golongan I Tipe C	2	Tidak Disetujui
3	Pengadaan Rumah Negara Golongan I Tipe D	2	Tidak Disetujui

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 549 unit dengan nilai sebesar Rp14.776.083.749,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp436.700.410,00 dengan rincian sebagai berikut:



Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	42.308	5.912.741.488	42.308	5.912.741.488
Alat Angkutan Bermotor	1	367.000.410	5	235.354.851	6	602.355.261
Peralatan dan Mesin Non TIK	8	69.000.000	448	1.582.994.256	456	1.651.994.256
Peralatan dan Mesin TIK	1	700.000	80	1.031.930.644	81	1.032.630.644
Alat Berat	0	0	0	0	0	0
Bangunan Gedung	0	0	6	6.007.805.000	6	6.007.805.000
Rumah Negara	0	0	0	0	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	7	4.787.510	7	4.787.510
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	10	436.700.410	42.854	14.775.613.749	42.864	15.212.784.159

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Bintuhan telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola
Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.
2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp277.682.488,00, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25031111430167 142	946/SEK/SK.PL1.2/III/2025	Selain Tanah Dan/Atau Bangunan	Rp4.615.000
2	PPL25042315212716 802	53/MK/KNL.0501/2025	Tanah Dan/Atau	Rp119.587.488



			Bangunan	
3	PPL25061815232730 835	5534/SEK/SK.PL1.2/VII/2025	Selain Tanah Dan/Atau Bangunan	Rp153.480.000

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp277.682.488,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25031111430167142	Penetapan Status Penggunaan	Rp4.615.000
2	PPL25042315212716802	Penetapan Status Penggunaan	Rp119.587.488
3	PPL25061815232730835	Penetapan Status Penggunaan	Rp153.480.000

Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN)

NIHIL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

**RESUME PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

1. Laporan Asuransi BMN 2025

Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan periode pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai tanggal 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025. Nilai Pertanggungan BMN yang diasuransikan sebesar Rp4.694.186.000 (empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam rupiah) dengan besaran premi yang dibayarkan sebesar Rp9.205.299 (Sembilan juta dua ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel A)

2. Klaim Asuransi BMN 2025

Tidak terdapat BMN yang diajukan proses klaim nya sebelum dan/atau pada tahun 2024, baik yang sudah selesai maupun masih dalam proses penyelesaian klaim.

(rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel B)

3. Rencana Pengasuransian BMN pada 2025

Melalui Keputusan Rencana Pengasuransian BMN No. 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 tanggal 13 Februari 2026, kegiatan pengasuransian BMN pada tahun 2026 rencananya akan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan, dengan Nilai Pertanggungan BMN yang diasuransikan sebesar Rp4.694.186.000 (empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam rupiah) dan total premi sebesar Rp9.205.299 (sembilan juta dua ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel C)

Bintuhan, 20 Februari 2026
Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan,



DINNA MUHARROKHAH, S.H.
NIP. 198111212012122001

Tabel A. Laporan Asuransi BMN 2025

DAFTAR LAPORAN PENGASURANSIAN BMN

Tabel A																							
No.	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Risiko Diasuransikan	Jangka Waktu		Penanggung Risiko	Nilai Pertanggungan	Besaran Premi	Riwayat Klaim	Nomor Polis	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kotamadya	Propinsi	Kode Pos		TMT Mulai	TMT Berakhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	05	01	2600	672994	4010124006	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1	Jl. Pengadilan - Padang Kempas	-	Desa Sinar Pagi	Kaur Selatan	Kabupaten Kaur	Bengkulu	38963	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya	1 Januari 2025	31 Desember 2025	Mahkamah Agung Republik Indonesia	4.694.186.000	9.205.299	Belum ada	705.235.110.25.00004/000/000	-

Bintuhan, 20 Februari 2026
Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan,

DINNA MUHARROKHMAN, S.H.
NIP. 1981111212012122001

Per 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)			Catatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen	
			N	I	H	I	L											
Total KDP																		

Laporan BMN Berupa Rumah Negara

NIHIL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,742,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	378,600	0
0.0	131111	Tanah	5,912,741,488	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,268,820,311	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,787,510	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,637,442,274
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,141,286,659
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,202,901,640
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,080,859
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,875,486,553
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,010,000
0.0	391111	Ekuitas	0	11,235,334,819
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	416,667
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,079,526,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,273	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59,927,580	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,807,130	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,270,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	123,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,929,400	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	53,083,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	179,876,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	18,540,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	452,904,826	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,504,800,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	63,044,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,412	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,299,840	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,919,016	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,793,600	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,808,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,340,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	367,512,754	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,317,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,071,270	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,067,890	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 9:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	8,068,873	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	477,096	0
3.0	522141	Beban Sewa	119,131,398	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,850,949	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,097,564	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	66,782,588	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	193,423,178	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,926,315	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,077,250	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,613,100	0
JUMLAH			21,182,959,471	21,182,959,471

Keterangan :

FINAL



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (672994) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Tgl Data : 25/02/26 2:01 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 8:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,121,200	7,709,450	(5,588,250)	(72.49)
JUMLAH ASET LANCAR	2,121,200	7,709,450	(5,588,250)	(72.49)
ASET TETAP				
Tanah	5,912,741,488	5,912,741,488	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,268,820,311	2,752,809,901	516,010,410	18.74
Gedung dan Bangunan	6,007,805,000	6,007,805,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,787,510	4,787,510	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,778,728,933)	(3,447,379,440)	(331,349,493)	9.61
JUMLAH ASET TETAP	11,415,425,376	11,230,764,459	184,660,917	1.64
JUMLAH ASET	11,417,546,576	11,238,473,909	179,072,667	1.59
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,212,982,499	2,722,423	1,210,260,076	44,455.25
Pendapatan Diterima Dimuka	0	416,667	(416,667)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,212,982,499	3,139,090	1,209,843,409	38,541.21
JUMLAH KEWAJIBAN	1,212,982,499	3,139,090	1,209,843,409	38,541.21
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH EKUITAS	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH EKUITAS	10,204,564,077	11,235,334,819	(1,030,770,742)	(9.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,417,546,576	11,238,473,909	179,072,667	1.59

Keterangan :
FINAL

BINTUHAN, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DINNA MUHARROKHMAL
198111212012122001 198111212012122001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 13

satker : 672994

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	132111	Peralatan dan Mesin	80,010,000	00501	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	80,010,000	0

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DATA LAPORAN ASET SENGKETA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)

No	Kode Satker	Wilayah	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jlh Bidang Tanah	Luas	Nilai Perolehan	Jenis Dokumen Kepemilikan Tanah	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Status Penggunaan	Substansi Permasalahan	Bersengketa / Bermasalah	Keterangan	Status	Data Dukung	
							N	I	H	I	L									

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		N	I	H	I	L			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

NOMOR : 1070/SEK.W8-U5/PL1.2.7/XII/2025

Nama Satker : Pengadilan Negeri Bintuhan
Kode Satker : 672994
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), bertempat di Pengadilan Negeri Bintuhan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Victor Andre Stepanus, S.E.
NIP : 199104132019031007
Jabatan : Ketua
2. Nama : Suman Julian, S.E.
NIP : 198410092015011002
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Tajudin Roni.
NIP : 199606042025211025
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semester 2 Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Victor Andre Stepanus, S.E.

.....

2. Suman Julian, S.E.

.....

3. Tajudin Roni.

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Bintuhan

DINNA MUHARROKMAH
NIP. 198111212012122001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbn@pn-bintuhan.go.id

HASIL OPNAME FISIK

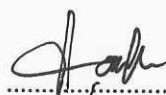
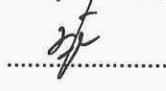
Nama Satker : Pengadilan Negeri Bintuhan
Kode Satker : 672994
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung

No	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi Barang		
				Saldo SAKTI	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1.	Spidol Board Marker	1010301001000026	Buah	1	1	-	✓	-	-
2.	Pena Standard	1010301001000028	Buah	5	5	-	✓	-	-
3.	Binder Clip "300"	1010301003000020	Kotak	1	1	-	✓	-	-
4.	Penghapus Pensil	1010301004000006	Buah	3	3	-	✓	-	-
5.	Buku Folio 200 L	1010301005000002	Buah	15	15	-	✓	-	-
6.	Buku Ekspedisi	1010301005000003	Buah	13	13	-	✓	-	-
7.	Buku Kwarto	1010301005000005	Buah	3	3	-	✓	-	-
8.	Map Kertas	1010301006000001	Pak	2	2	-	✓	-	-
9.	Box File	1010301006000004	Buah	4	4	-	✓	-	-
10.	Map Plastik Lobang	1010301006000014	Buah	3	3	-	✓	-	-
11.	Refill Cutter	1010301008000002	Kotak	4	4	-	✓	-	-
12.	Pembolong Kertas Besar No. 85 B	1010301008000011	Buah	1	1	-	✓	-	-
13.	Peruncing Kecil	1010301999000037	Buah	6	6	-	✓	-	-
14.	Kertas HVS Folio	1010302001000002	RIM	3	3	-	✓	-	-
15.	Tissu Paseo	1010302002000011	Buah	20	20	-	✓	-	-
16.	Amplop Casing Folio	1010302004000003	Pak	1	1	-	✓	-	-
17.	Amplop Cabinet	1010302004000006	Pak	1	1	-	✓	-	-
18.	Cartridge Warna Cannon IP 2770	1010304004000019	Buah	1	1	-	✓	-	-
19.	Sabun Cuci Tangan Souji	1010305008000015	Buah	2	2	-	✓	-	-
20.	Sabun Cuci Tangan Alfa	1010305008000019	Buah	1	1	-	✓	-	-
21.	So Klin Lantai Lavender	1010305008000022	Buah	2	2	-	✓	-	-

23.	So Klin Lantai SRH	1010305008000023	Buah	2	2	-	√	-	-
24.	Sabun Cuci Tangan Alfa G	1010305008000027	Buah	1	1	-	√	-	-
25.	Vixal Botol Green	1010305008000033	Buah	2	2	-	√	-	-
26.	Vixal Botol Blue	1010305008000034	Buah	2	2	-	√	-	-
27.	Sabun Cuci Tangan Souji REF	1010305008000034	Buah	2	2	-	√	-	-
28.	Sabun Cuci Tangan Souji HS JPN	1010305008000040	Buah	2	2	-	√	-	-
29.	Baygon AE CTR FRS	1010305008000043	Buah	2	2	-	√	-	-
30.	So Klin Lantai Apple	1010305008000046	Buah	1	1	-	√	-	-
31.	SOS Sereh	1010305008000047	Buah	1	1	-	√	-	-
32.	SOS Apple	1010305008000048	Buah	1	1	-	√	-	-
33.	Sabun Cuci Tangan Alfa Straw	1010305008000049	Buah	1	1	-	√	-	-
34.	Glade Pengharum Lavender	1010305012000019	Buah	1	1	-	√	-	-
35.	Stella Gantung AIO BLI	1010305012000020	Buah	1	1	-	√	-	-
36.	Stella Gantung Apple	1010305012000021	Buah	1	1	-	√	-	-
37.	Kapur Barus Swallow K. WRN	1010305012000023	Buah	1	1	-	√	-	-
38.	Kapur Barus Swallo KMPR ORG	1010305012000025	Buah	1	1	-	√	-	-
39.	Baterai A3	1010306010000008	Pasang	2	2	-	√	-	-

Tim Pelaksana Opname Fisik :

1. Victor Andre Stepanus, S.E.
2. Suman Julian, S.E.
3. Tajudin Roni.


Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Bintuhan


DINNA MUHARROKHAMAH
NIP. 198111212012122001